



**TUGAS DAN FUNGSI PUSAT MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN TNI
GUNA MENINGKATKAN KESIAPAN OPERASI SATUAN TUGAS TNI
DALAM RANGKA MEMANTAPKAN DIPLOMASI MILITER
DI FORUM INTERNASIONAL**

Surya Wibawa Suparman

Prodi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Implementasi misi pokok TNI yaitu diwujudkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam OPPD yang berlangsung sukses dan sangat dihargai oleh PBB serta negara lain. Dan pada saat ini bangsa Indonesia telah dan sedang melaksanakan misi perdamaian dunia di beberapa negara pada berbagai konflik yang semakin berkembang dan bersifat Multi-Dimensional, sesuai dengan komitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, salah satunya diwujudkan dalam bentuk keterlibatan pada misi Pemeliharaan Perdamaian di bawah bendera PBB. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI lebih mempertegas lagi dengan mencantumkan salah satu misi pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang adalah “melaksanakan Misi Perdamaian Dunia sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri”. Perlunya PMPP TNI untuk meningkatkan kemampuannya untuk menyiapkan personel dan materiil sesuai dengan UNPCRS yang siap dioperasionalkan sesuai dengan perkembangan pola konflik yang terjadi. Metode “berbeda” yang telah ditunjukkan oleh TNI melalui CIMIC TNI menjadi sangat ternilai mengingat peranannya yang sangat dominan dalam upaya penyelesaian berbagai konflik yang sedang terjadi di daerah misi dalam rangka memantapkan diplomasi militer Indonesia di forum Internasional. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelibatan TNI pada OPPD menjadi hal penting dan merupakan tanggungjawab moral bangsa Indonesia sebagai bagian di forum Internasional. Baik dalam meningkatkan kredibilitas, mewujudkan kerjasama Internasional, maupun memberikan solusi dalam penyelesaian berbagai masalah terkait dengan perdamaian dunia, yang diikuti dengan berbagai diplomasi yang merupakan strategi pertahanan dan Kampanye Militer sebagai tindak lanjut konsep Pertahanan Negara. Tulisan ini menyajikan analisis tugas dan fungsi PMPP TNI guna meningkatkan kesiapan operasi Satgas TNI dalam rangka memantapkan Diplomasi Militer di Forum Internasional.

Kata Kunci: Tugas, Fungsi, PMPP TNI, Operasi, Diplomasi Militer, Forum Internasional.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki kepentingan nasional (national interest) masing-masing, yang secara implisit tersirat dalam kebijakan politik negara tersebut. Dan, kepentingan nasional sebuah negara merupakan alasan terpenting bagi negara tersebut dalam menjalin kerjasama dengan negara lain, dalam lingkup hubungan internasional. Realitanya, globalisasi telah menempatkan dinamika hubungan internasional pada meningkatnya dimensi kerjasama hubungan antarnegara, ketimbang dimensi konfliknya. Meskipun dalam menegakkan kepentingan nasionalnya, terkadang sebuah negara membutuhkan power atau kekuatan. Baik berupa kekuatan militer, maupun berupa kemampuan negara tersebut dalam peran dan pengaruhnya dalam dunia internasional. Terlebih pada era globalisasi kini, mustahil ada negara yang dapat mewujudkan dan meningkatkan stabilitas keamanan di suatu wilayah, tanpa perdamaian yang bersifat global, karena setiap negara saling terkait, dan saling mempengaruhi.

Namun diplomasi internasional bukanlah ruang kosong. Di dalamnya, ada unsur-unsur yang memengaruhi kualitas hubungan antara negara satu dengan negara lain, yakni mencakup perpindahan penduduk, pertukaran budaya, unsur ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, hingga pertahanan dan keamanan. Artinya, banyak unsur yang bisa menjadi potensi atau alasan bagi suatu negara, untuk dapat dijadikan peluang dan modal penting dalam hubungan diplomasi Internasional. Dengan kata lain, unsur-unsur tersebut menjadi alasan bagi terciptanya simbiosis dengan bangsa lain di forum Internasional, sekaligus menentukan citra negara tersebut di mata dunia.

Pun dalam bidang keamanan, yang terkait erat dengan kebijakan politik dan hubungan internasional, akan

berimplikasi strategis terhadap konsep Ketahanan Nasional maupun terhadap stabilitas suatu negara. Maka, stabilitas dan keamanan di berbagai negara yang sedang mengalami dan menghadapi krisis, baik krisis sosial, ekonomi dan perkembangan politik, harus diupayakan. Sebab, kondisi damai akan mendorong semakin meningkatnya keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa. Bahkan diimplementasikan dalam bentuk partisipasi aktif dalam berbagai organisasi Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) alias United Nations (UN). PBB, seperti kita ketahui, adalah organisasi Internasional bentukan sekumpulan negara pemenang Perang Dunia ke-II, pada 24 Oktober 1945. Fungsi PBB yang bermarkas di New York Amerika Serikat ini, utamanya untuk mendorong kerjasama internasional dalam menciptakan perdamaian bersifat global, atau perdamaian dunia. Saat ini PBB memiliki 193 negara anggota, yang masing-masing mewakili kepentingan-kepentingan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik luar negerinya. (P. Anthonius Sitepu, 2011).

Indonesia menyadari bahwa dewasa ini keberadaan sebuah negara agar dapat diterima dalam tatanan dunia Internasional, tak cukup dengan sekedar meningkatkan produk Nasional. Lebih dari itu, diperlukan kepedulian dan political will dari Kepala Negara atau kepala pemerintahan negara tersebut, terhadap suatu tren hubungan Internasional di dunia (Gede Sumertha dan Armaidly Armawi, 2011). Artinya, peran suatu negara di dalam percaturan tingkat dunia tentunya akan berdampak dan bernilai positif bagi kepentingan nasional negara tersebut, dan menjadi perhitungan di dunia Internasional. Hal ini terlihat dalam kontribusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota ke-60 PBB sejak 1950, yang telah mengirimkan Satgas TNI untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian

Dunia (OPPD) sejak 1957. Satgas TNI dalam OPPD ini dikenal sebagai Kontingen Garuda (Konga). (Journal of International Relation Vol 4, 2018).

Diplomasi Internasional yang dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan diplomasi lainnya, seperti diplomasi militer atau diplomasi pertahanan. Dalam arti, diplomasi pertahanan sebagai suatu cara memenangkan kepentingan bangsa menggunakan sumber daya p e r t a h a n a n / militer, tanpa harus mengedepankan kekerasan. Melainkan sebagai Satgas OPPD yang tergabung dalam pasukan PBB. Keterlibatan Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB, sesuai pengertian mengenai diplomasi pertahanan, yakni, "sebagai salah satu bentuk diplomasi yang memanfaatkan sumber daya pertahanan Negara dengan cara dan metode diplomatis, untuk kepentingan damai." (Wiranto, 2018).

Sejak 1957, jumlah personel Satgas TNI dalam OPPD PBB terus meningkat. Bahkan, dalam forum PBB bertajuk United Nations General Assembly di New York, Amerika Serikat pada 2015, Presiden RI yang diwakili oleh Wapres RI, Jusuf Kalla sebagai Ketua Delegasi RI, menyampaikan pernyataan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan menambah jumlah pasukan pemelihara perdamaiannya menjadi 4.000 personel pada tahun 2019. Baik personel dari TNI maupun Polri, (Pidato M. Jusuf Kalla Wapres RI, pada sidang Majelis Umum PBB ke 71 di New York, 23/ 9/ 2015). Penerbitan Peraturan Menteri Luar Negeri RI nomor 5 tahun 2015, 2 berisi tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Penjaga Perdamaian (Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers), sejak 2015 hingga 2019. Selanjutnya, Peraturan Menteri Luar Negeri RI nomor 5 tahun 2015 tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Luar Negeri RI tahun 2017.

Prestasi Satgas TNI yang tergabung dalam pasukan PBB di luar negeri, antara lain terlihat pada meningkatnya Diplomasi Pertahanan dan posisi RI sebagai Anggota Tidak Tetap DKPBB. Implementasi kebijakan strategi pertahanan TNI dalam melakukan diplomasi militer untuk mendukung diplomasi politik Indonesia, dinilai sangat berhasil sebagai Satgas TNI dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD). Negara-negara lain pun menilai positif kinerja Satgas TNI, bahkan sangat menghargai Indonesia. Semakin besarnya kepercayaan PBB dan dunia Internasional yang pada akhirnya Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap di DK PBB 2019 s.d. 2020 pada tanggal 8 Juni 2018 bersama dengan Negara-negara lain seperti Jerman, Afrika Selatan, Belgia dan Republik Dominika (Kemlu RI, keanggotaan Indonesia pada DKPBB).

Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, maka Menteri Luar Negeri RI selaku Ketua TKMPP ingin menunjukkan visi Bangsa Indonesia kepada dunia Internasional. Khususnya dalam mengembangkan peran dan partisipasi Indonesia secara signifikan, melalui peacekeeping operation dengan memperkuat peran dari 3 (tiga) komponen PKO yaitu kekuatan militer, polisi dan sipil. Saat ini Bangsa Indonesia telah dan sedang melaksanakan misi perdamaian dunia di beberapa negara, pada berbagai konflik yang semakin berkembang dan bersifat Multi-Dimensional. Indonesia mampu memenuhi pernyataan tersebut, sehingga posisi Indonesia masuk di dalam jajaran 10 besar negara penyumbang pasukan perdamaian atau biasa dikenal dengan sebutan TCC (Troop Contributing Countries).

Tak dapat dipungkiri bahwa terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DKPBB, tentunya tak luput dari peran serta TNI yang saat ini sangat

vital dan strategis, untuk memantapkan Diplomasi Militernya di forum Internasional. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pertahanan Negara yang salah satunya berbunyi "Ikut serta secara aktif dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Regional dan Internasional" (UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara).

Adapun rumusan masalah yang didasari dengan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini adalah: Tugas dan Fungsi PMPP TNI guna meningkatkan Kesiapan Operasi Satgas TNI dalam rangka Memantapkan Diplomasi Militer di Forum Internasional.

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai yaiut bagaimana tugas dan fungsi PMPP TNI dalam menyiapkan personel dan mengawasi Satgas TNI dalam OPPD?, bagaimana tugas dan fungsi PMPP TNI dalam Penyiapan, Pemeliharaan dan Penggantian materiil atau Contingent Owned Equipment (COE) yang digunakan Satgas TNI dalam OPPD?, bagaimana tugas dan fungsi PMPP TNI dalam penyiapan tugas CIMIC TNI dalam dalam OPPD?, bagaimana tugas dan fungsi PMPP TNI dalam mendukung Strategi Kampanye Militer?

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa tugas dan fungsi PMPP TNI dalam menyiapkan personel dan mengawasi Satgas TNI dalam OPPD, menganalisa tugas dan fungsi PMPP TNI dalam Penyiapan, Pemeliharaan dan Penggantian materiil atau Contingent Owned Equipment (COE) yang digunakan Satgas TNI dalam OPPD, menganalisa tugas dan fungsi PMPP TNI dalam penyiapan tugas CIMIC TNI dalam OPPD, dan menganalisa tugas dan fungsi PMPP TNI dalam mendukung Strategi Kampanye Militer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif

digunakan dengan mengurai elemen/komponen teori operasi dan teori diplomasi untuk mengetahui tugas dan fungsi PMPP TNI guna meningkatkan Kesiapan Operasi Satgas TNI dalam rangka Memantapkan Diplomasi Militer di Forum Internasional. Peneliti menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melaksanakan wawancara terhadap subjek penelitian dan studi dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka.

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode triangulation melalui penggabungan analisis data yang sumbernya dari metode, sumber data, subjek peneliti dan teori. Analisis data penelitian menggunakan model Miles dan Huberman (2014) dimana "proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, sebelum di lapangan, sewaktu di lapangan dan setelah di lapangan, baik data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan/observasi yang telah ditulis dalam catatan lapangan maupun dokumen yang dilengkapi dengan dokumentasi dan sebagainya".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI) adalah Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) milik TNI, yang pembentukannya ditinjau dari perspektif luas dalam konteks Internasional. Partisipasi TNI ini merupakan indikator utama dan konkrit dari peran negara RI dalam berkontribusi menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut sebagai sarana meningkatkan profesionalisme perorangan/ individu, termasuk organisasi yang terlibat secara langsung, dalam penggelaran kekuatan multinasional/ internasional. Partisipasi Satgas TNI cukup besar, melalui Satgas

Kontingen Garuda (Konga) baik dalam misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), UNMISS di Sudan Selatan, UNISFA di Sudan, UNAMID di Darfur, MONUSCO di Kongo, UNMIL di Liberia, MINUSTAH di Haiti, RDB MONUSCO di Kongo dan UNPRC di Yaman.

Dalam meningkatkan kemampuannya, TNI telah mengadakan validasi PMPP TNI berdasarkan Perppang TNI Nomor 73 Tahun 2019 dengan tugas dan fungsinya. Pada pasal 4 dijelaskan tugas PMPP TNI yaitu menyelenggarakan organisasi, perencanaan anggaran, kesiapan operasi, seleksi, pelatihan, rotasi pasukan (pemberangkatan / pengembalian), pembinaan personel, logistik operasi untuk Satgas TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda, Pengamat Militer (Military Expert on Mission), Staf Militer (Military Staff/ Millstaff) dan penugasan lainnya serta kerjasama Internasional yang terkait dengan misi OPPD di bawah naungan bendera PBB.

Terkait dengan fungsi PMPP TNI dijelaskan pada Pasal 5 dan terbagi menjadi 3 yaitu: fungsi Utama, fungsi Khusus dan fungsi Umum. Secara konsep, semua perencanaan dan pelaksanaan persiapan sudah bagus, namun dalam pelaksanaannya, penulis melihat masih terdapat permasalahan. Baik dari segi personel, maupun materiil Satgas TNI yang masih harus menyesuaikan dengan standar UNPCRS (United Nations Peace Capability Readiness System). Serta tugas, fungsi utama dan fungsi khusus yang perlu ditingkatkan dalam rangka memantapkan diplomasi militer di Forum Internasional. Misalnya, dari segi personel, kemampuan personel TNI yang sangat terbatas khususnya dalam penguasaan Bahasa Inggris, dan kesiapan Alutsista maupun materiil yang dimakan usia, sehingga akan berdampak terhadap penilaian PBB terhadap Indonesia. Adapun kendala yang

dihadapi Satgas TNI di luar negeri pada umumnya, sebagai berikut:

a. Sistem Perekrutan Belum Optimal.

PMPP TNI telah melaksanakan perekrutan calon personel yang akan tergabung dalam Satgas TNI dalam 4 OPPD, sebagai tahap paling awal dan menentukan. Persyaratan menjadi personel Satgas TNI ditentukan sesuai basic standard requirement UNPCRS (United Nations Peace Capability Readiness System), antara lain adalah memenuhi "Security Clearance" (tidak memiliki permasalahan hukum), memenuhi standar kesehatan, memenuhi standar kesehatan jiwa, memenuhi standar kesamaptan meliputi tes kesegaran jasmani A dan B, mampu berbahasa Inggris dengan baik, meliputi Listening, Reading, Writing dan Speaking, mampu mengoperasikan computer (program Word, Excel, Power Point dan Out Look), serta mampu mengendarai kendaraan roda 4 dengan stir kiri.

Kenyataan di lapangan, seperti dialami sendiri oleh penulis saat menjadi Komandan Satgas dan Komandan Kontingen Garuda TNI, yaitu munculnya surat komplain dari kepala bagian salah satu staf PBB kepada Komandan Kontingen Garuda TNI akibat adanya personel Milstaf TNI yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris sangat dasar (basic), tidak menguasai penggunaan komputer bahkan belum memahami tugas dan tanggungjawabnya dengan benar. Lantas, ada juga personel yang belum memahami tugas tanggung jawabnya dengan benar.

Belum mumpuninya kualitas SDM personel Satgas ini, menurut Kolonel Inf Herman Harnaz selaku Dirbin Pers PMPP TNI, terlihat juga pada beberapa personel Satgas TNI yang sakit akibat penyakit bawaannya kambuh saat bertugas di daerah misi. Bahkan ada juga yang meninggal dunia karena sakit.

Mengapa masih ada personel yang kemampuannya tak memenuhi standar, bahkan personel yang menderita penyakit bawaan, namun lolos seleksi untuk berangkat tugas ke daerah misi? Penyebabnya, karena pelaksanaan rekrutmen yang dilaksanakan oleh PMPP TNI saat ini belum optimal, akibat masih adanya intervensi pemilihan personel.

- b. Kurangnya penyiapan Perwira TNI pada jabatan strategis di Markas PBB dan penugasan OPPD.

Dalam penggelaran OPPD, seperti disampaikan oleh Kolonel Kav Didik Setiadi Selaku Paban VIII/Opslugri Sops TNI, bahwa terdapat banyak peluang jabatan strategis yang dapat meningkatkan daya tawar Indonesia dan TNI di mata dunia Internasional. Jabatan-jabatan tersebut seperti Force Commander, Deputy Force Commander, Sector Commander di daerah misi dan jabatan staf di UNDPKO (United Nations Department of Peacekeeping Operations) di New York. Sayangnya, data yang didapat dari staf Paban VII/Opslugri Sops TNI menunjukkan bahwa dari 12 jabatan yang dilelang PBB, TNI mengirimkan 15 orang, dan hanya 1 (satu) personel Pamen yang terpanggil sampai ke tingkat wawancara. Gagalnya uji kompetensi ini disebabkan keterbatasan berbahasa Inggris (basic) dan pengetahuan tentang peacekeeping mission. Hal ini menunjukkan masih rendahnya perwira TNI yang mampu bersaing di forum Internasional.

Bukannya kita tak mampu. Namun, dalam sejarah keikutsertaan Indonesia dalam OPPD PBB sejak tahun 1957, memang hanya ada beberapa Jenderal TNI yang pernah menduduki jabatan strategis. Menurut Mayjen TNI Achmad Marzuki selaku narasumber, mereka antara lain: Mayjen TNI Rais Abin sebagai Force Commander di UNEF, Brigjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono di UNPROFOR Bosnia, Brigjen Zahari

Siregar sebagai staf desk UNIFIL di UNDPKO, Mayjen TNI Imam Edy sebagai Force Commander di MINURSO, Brigjen TNI Karmin Suharna sebagai Chief of Staff di UNAMID Darfur dan Brigjen Nur Alamsyah sebagai Sector Commander di UNAMID Darfur.

Masih “minimnya” jumlah Perwira TNI yang mampu memberi kontribusi lebih pada kancah perdamaian dunia, menurut Presiden keenam RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam peresmian Markas Indonesia Peace and Security Centre di Sentul, Bogor pada 19 Desember 2011, “Jumlah perwira-perwira Indonesia yang menjadi Leaders tidak terlalu banyak, karena hambatan bahasa dan pengetahuan tentang Peacekeeping Mission itu sendiri.” Kendala tersebut, diakui oleh Kolonel Arm Heru Langlangbuana selaku Dirbin Ops PMPP TNI, bahwa memang PMPP belum menyiapkan secara khusus perwira TNI untuk jabatan Strategis dalam penugasan OPPD di Markas PBB.

Tergambar bahwa hambatan utama terkait sedikitnya jumlah perwira TNI yang mampu bersaing di forum Internasional, karena belum adanya penyiapan khusus dalam penguasaan bahasa dan pengetahuan mengenai peace keeping mission.

- c. Kualitas Tenaga Instruktur (Subject Matter Expert) Belum Sesuai Standar.

Masih belum setaranya kualitas Instruktur atau Pelatih prajurit TNI dalam berbagai misi OPPD, setidaknya membutuhkan dua hal: pengalaman tugas dan kemampuan dalam mentransfer ilmu. Seperti disampaikan Kolonel Inf Amril Haris Isya Siregar selaku Dirbinlat PMPP TNI, bahwa selama ini tenaga instruktur (Subject Matter Expert) —terutama untuk mengatasi kekurangan tenaga Instruktur—dipenuhi oleh personel TNI yang baru kembali dari misi OPPD.

Mereka dipanggil ke Sentul oleh PMPP TNI, untuk membantu melatih calon personel Satgas. Namun, personel yang ditunjuk sebagai instruktur itu tak semuanya menguasai ilmu sesuai standar instruktur yang mumpuni.

Seperti dikatakan oleh Kolonel Mar Burhanudin selaku Komandan Satuan Latihan (Satlat) PMPP TNI bahwa belum adanya Program Sertifikasi Instruktur PMPP TNI. Bahkan masih banyak tenaga Instruktur yang belum pernah mengikuti pendidikan spesialisasi pelatihan. Maka perlu diwacanakan untuk melakukan penambahan waktu Latihan Pratugas selama 30 hari, agar pembekalan kemampuan dan keterampilan personel TNI dapat lebih optimal dan sesuai standar PBB.

Kendala lainnya, bila instruktur yang memberi pelatihan itu ternyata memiliki pengalaman tugas berbeda dengan personel yang akan berangkat tugas ke tempat berbeda. Misal, Satgas TNI yang akan berangkat OPPD di UNAMID Kongo, ternyata dilatih oleh personel yang berpengalaman dalam misi UNIFIL Lebanon. Betul bahwa secara umum, materi standar penugasan sebagai pasukan PBB memang sama. Namun, ada beberapa materi yang berbeda, karena masalah di tiap negara berbeda. Padaahal, penanganan atas tiap permasalahan harus sesuai dengan karakteristik daerah misi.

- d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana PMPP TNI dalam Mendukung Latihan Pratugas Satgas TNI.

Sarana dan Prasarana yang tersedia di PMPP TNI tak lagi optimal karena sudah banyak yang mengalami kerusakan, kata Kolonel Inf Amril Haris Isya Siregar Dirbinlat PMPP TNI. Contohnya banyak. Mulai dari jaringan CCTV yang tidak dapat digunakan lagi, hingga sarana Desa Simulasi yang rusak. Bahkan belum adanya beberapa sarana

penunjang Latpratugas OPPD -- seperti tower serbaguna, ranpur Anoa, dan lainnya--, sehingga masih harus meminjam dari satuan terdekat.

- e. Belum Adanya Puskodal (mission desk) dan Prosedur Tetap (Protap) tentang pengendalian kegiatan Satgas TNI di daerah misi OPPD.

Satgas TNI —lainnya seluruh pasukan militer dari negara lain yang melaksanakan misi OPPD di negara-negara konflik— berada di bawah bendera dan kendali operasi PBB. Namun, tiap negara ini tentunya tetap bertanggung jawab dan harus melaksanakan pengawasan serta monitoring atas militernya masing-masing, termasuk Indonesia. Terlebih, tugas OPPD di setiap daerah konflik tentu kondisinya berubah-ubah (dinamis). Maka, sesuai dengan teori Strategi bahwa dibutuhkan pusat pengendalian dan pengawasan alias Puskodal.

Seperti dinyatakan oleh Kolonel Arm Heru Langlangbuana selaku Dirbin Ops PMPP TNI, bahwa Satgas membutuhkan Puskodal (mission desk) dan Contingency Plan. Sebab, Puskodal (mission desk) diperlukan untuk menjalankan fungsi monitoring, pengawasan atau kontrol kegiatan setiap personel Satgas TNI, agar dapat tetap mematuhi UN SOP (Standard Operation Procedure/Protap), ROE (Rule Of Engagement/ Aturan Pelibatan). Sedangkan Contingency Plan (Rencana Tindakan Kontijensi) dari TNI sangat dibutuhkan oleh Satgas TNI bila terjadi chaos di daerah misi, mengingat kondisi dinamis yang berlangsung di daerah penugasan.

Terkait materiil atau alutsista dan peralatan Satgas TNI di luar negeri, PMPP TNI juga masih mengalami kendala. Antara lain:

- a. Belum adanya badan pelaksana pengadaan barang

dan jasa di bawah pengendalian PMPP TNI.

Suatu hari, Misi UNIFIL Satgas TNI mengalami kesulitan di tempat penugasan. Masalahnya, sparepart berupa 172 unit Ban Ranpur Anoa yang dipesan oleh Satgas TNI UNIFIL, tak dapat digunakan, karena ukuran ring rodanya berbeda. Pengadaan sparepart yang dipenuhi oleh Mabes TNI itu akhirnya mubazir, karena tidak dapat digunakan oleh Satgas TNI, tak dapat ditukar barangnya, apalagi dikembalikan uangnya. Mengapa bisa terjadi hal demikian?

Menurut Kolonel Mar Dedy Ronan selaku Dirbin Log PMPP TNI, bahwa saat ini pengadaan barang masih menjadi domain dari Mabes TNI, dalam hal ini penanggung jawab seluruhnya masih berada di bawah Staf Log TNI. Selama ini Staf Logistik PMPP TNI hanya mengumpulkan data dengan spesifikasinya dan mengirimkan data tersebut ke Slog Mabes TNI untuk ditindaklanjuti oleh Babek TNI (Perlengkapan) dan Komlek (Radio).

Kondisi ini jelas menyulitkan, jika pengadaan besar maupun kecil masih harus menempuh birokrasi yang panjang, kerap menyebabkan terjadinya keterlambatan kedatangan dukungan kebutuhan materiil, maupun bekal ulang yang diperlukan Satgas TNI di daerah misi. Padahal, keterlambatan dukungan materiil dan bekal ulang tersebut, tak hanya akan mengurangi kesiapan operasional Satgas TNI. Melainkan berdampak pula terhadap berkurangnya Reimbursement yang diterima.

Belum adanya badan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bawah kendali PMPP TNI ini harus segera diatasi. Mayjen TNI Victor Hasudungan Simatupang, M.Bus, selaku Komandan PMPP TNI menjelaskan bahwa pengadaan sparepart kecil untuk Satgas TNI, dalam kondisi urgent yang membutuhkan kecepatan, biasanya langsung ditangani oleh Satgas TNI.

Namun untuk peralatan atau sparepart besar, tetap menunggu dari Mabes TNI. Jika saja kewenangan atas pengadaan itu sudah didapat sepenuhnya, maka personel PMPP TNI yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang haruslah menguasai detail mengenai setiap material yang dibutuhkan oleh Satgas TNI.

- b. Rencana penggunaan anggaran reimbursement PBB belum secara efisien sesuai UNPCRS.

Pemenuhan materiil Satgas TNI secara efisien sesuai dengan UNPCRS, menurut Kolonel Mar Dedy Ronan selaku Dirbin Log PMPP TNI, dilaksanakan berdasarkan Perpang No. 74 Tahun 2018 tentang penggunaan dana reimbursement. Penerapannya di lapangan, masih sering terjadi keterlambatan dukungan materiil dan bekal ulang. Dampaknya, tak hanya akan mengurangi kesiapan operasional Satgas TNI, melainkan juga akan dapat berakibat pada berkurangnya reimbursement yang diterima.

Beberapa contoh nyata yang didapat oleh penulis antara lain: Pemotongan Reimbursement pada Satgas Kizi MONUSCO di Kongo pada tahun 2014 s.d 2015 (Laporan penerimaan Reimbursement Satgas Kizi Monusco Kongo tahun 2014 dan 2020). Juga terjadi 7 pemotongan Reimbursement Satgas Yonmek UNIFIL tahun 2013, 2014 dan 2015 (Laporan penerimaan Reimbursement Satgas Yonmek UNIFIL tahun 2013, 2014 dan 2015). Mengapa bisa demikian? Penyebabnya ternyata: kondisi alutsista TNI yang berada di daerah misi saat ini—seperti ditegaskan oleh Kolonel Arm Heru Langlangbuana selaku Dirbin Ops PMPP TNI— rata-rata sudah dimakan usia. Hal itu tentu saja berpengaruh besar terhadap kualitas kinerja dan tingkat kesiapan Operasional. Artinya, bukan sekedar bakal membutuhkan

biaya tinggi dalam operasional dan pemeliharaannya, jika alutsista tersebut bolak-balik bermasalah dan perlu perawatan ekstra. Melainkan juga berdampak terhadap kredibilitas dan reputasi peacekeepers Indonesia yang selama ini cenderung dinilai positif, akibat kurangnya kemampuan untuk mempertahankan kualitas Contingent Owned Equipment (COE) milik Indonesia. Jangan lupa, PBB memberlakukan pemotongan reimbursement atas COE yang rusak atau tidak berfungsi baik.

Saat ini TNI menggunakan sistem sistem penggantian/ pembayaran Wet Lease sehingga semua kesiapan perlengkapan yang digunakan Satgas TNI selama berada di daerah misi, menjadi tanggungjawab TNI. Namun TNI akan mendapat penggantian/ pembayaran dari PBB dalam dukungan dan pemeliharaan tersebut. Untuk itu, setiap 3 bulan dilaksanakan pemeriksaan kesiapan Operasi (COE) sebagai pertanggungjawaban dari reimbursement yang diberikan untuk pemeliharaan kesiapan seluruh perlengkapan Satgas TNI.

Menurut Kolonel Kav Didik Setiadi selaku Paban VIII/Opslugri Sops TNI, PBB juga dapat merepatriasi Satgas TNI yang kesiapan operasionalnya berada di bawah 60%. Bayangkan. Bagaimana kinerja dan reputasi Indonesia jika alutsistanya rewel akibat penyakitan, dan bolak-balik mengajukan reimbursment yang belum optimal perencanaannya? Menurut Kolonel Mar Dedy Ronan selaku Dirbin Log PMPP TNI, pemenuhan materiil secara efisien sesuai dengan UNPCRS, dilaksanakan berdasarkan Perpang No. 74 Tahun 2018 tentang penggunaan dana reimbursement.

Di sisi lain, Pemerintah RI senantiasa perlu rnengantisipasi keperluan untuk menyesuaikan spesifikasi COE Satgas TNI, apabila PBB sewaktu-waktu menerbitkan Manual

terkait COE yang baru. Maka, TNI wajib mematangkan rencana penggunaan anggaran reimbursement PBB secara tepat guna dan efisien, terutama dalam pemenuhan materiil, sesuai UNPCRS.

- c. Kewenangan PMPP TNI untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di luar negeri.

Menurut Kolonel Mar Dedy Ronan selaku Dirbin Log PMPP TNI, PMPP TNI selaku Balakpus, TNI memiliki bertanggung jawab dalam pembinaan logistik yang digunakan Satgas TNI dalam OPPD. Baik itu secara Satgas maupun perseorangan. Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, tergambar dari masih seringnya terjadi keterlambatan dukungan materiil dan bekal ulang yang diperlukan Satgas TNI di daerah misi. Sedangkan kondisi alutsista/ material yang digunakan di daerah misi — seperti sudah disinggung di atas— sudah banyak yang mengalami kerusakan karena pengaruh usia.

Jika dihadapkan pada teori Manajemen Logistik, terjadinya keterlambatan dukungan materiil dan bekal ulang tersebut, bukan hanya akan mengurangi kesiapan operasional Satgas TNI. Melainkan akan dapat berakibat pada berkurangnya Reimbursement yang diterima. Seperti disampaikan Commander C. Theo. Vogelgesang, USN yang tertulis dalam Manajemen Logistik Pertahanan (Dr. I Wayan Midhio, M. Phil, 2020) bahwa terkait strategi, logistik barulah memiliki karakter kekuatan dinamis. Artinya, tanpa logistik, konsepsi strategis hanyalah sebuah rencana kertas.

Menurut Kolonel Kav Didik Setiadi selaku Paban VIII/ Opslugri Sops TNI, bahwa permasalahan ini karena dalam memenuhi kebutuhan Satgas TNI, PMPP memiliki keterbatasan dan masih bergantung kepada Staf Logistik TNI dan Srenum TNI. Artinya, dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik, harus melalui proses birokrasi yang cukup

panjang. Padahal Satgas TNI membutuhkan logistik tersebut secara cepat, agar menghindari sanksi berupa pemotongan reimbursement. Sanksi tersebut secara tidak langsung dapat memengaruhi penilaian PBB terhadap Indonesia. Contoh nyata pernah terjadi pemotongan reimbursement Satgas TNI yang sedang melaksanakan OPPD.

Kondisi saat ini sehubungan mekanisme pengadaan barang atau logistik Satgas TNI oleh PMPP yakni :

1. Dalam konsep validasi organisasi PMPP TNI, dibentuk bagian perwakilan pengadaan luar negeri di bawah Dirbin Log PMPP TNI. Bagian ini memiliki tugas melaksanakan pengadaan secara terbatas untuk materiil Satgas TNI yang bersifat kritis, dan materiil tersebut tersedia di daerah misi, atau di negara sekitarnya.
2. Kendala yang akan dihadapi adalah perlunya personel yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
3. Belum jelasnya kewenangan terkait pengadaan barang, bisa berdampak pada terjadinya duplikasi wewenang dengan Babek TNI sebagai badan pelaksana pengadaan materiil. Maka dibutuhkan organisasi pengadaan PMPP TNI yang dilengkapi aturan yang jelas mengenai kewenangan pengadaan, agar tak terjadi kesalahan administrasi dalam penentuan kebijakan pengadaan.
- d. Tugas dan Fungsi PMPP TNI dalam Penyiapan Penugasan CIMIC TNI dalam OPPD.

CIMIC, Pendekatan Humanis Khas Satgas TNI, selama ini sudah dikemas secara apik melalui program Civil Military Coordination (CIMIC) dengan tagline "To Win the Heart and Mind of The People". Program ini menuai banyak pujian sekaligus memantapkan Citra Indonesia di dunia Internasional, karena CIMIC terbukti telah menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini tidak dapat diselesaikan oleh pasukan penjaga perdamaian dari negara lain. Tak jarang, CIMIC mampu meredam timbulnya potensi konflik baru.

Namun, sebenarnya kegiatan CIMIC Satgas TNI, yang masih bersifat No/Low Cost CIMIC Activity (tanpa bantuan dana) masih belum optimal. Sebab, peran PMPP TNI dalam penyiapan penugasan CIMIC TNI untuk menjawab tantangan tugas OPPD — yang makin kompleks dan menantang, dan awalnya bersifat inter-state menjadi intra-state— masih terbatas pada:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan personel female peacekeepers ataupun pasukan penjaga perdamaian wanita dengan kemampuan khusus.

Keberadaan Female Peacekeeper dalam OPPD PBB, menurut Afaf Omer sebagai penasehat gender di UNIFIL — salah satu misi perdamaian PBB— telah melindungi masyarakat lokal di daerah misi, khususnya perempuan dan anak-anak. Selain itu, female peacekeeper juga dapat berperan sebagai panutan dalam lingkungan lokal, dengan menginspirasi perempuan dan anak perempuan di masyarakat yang sering didominasi laki-laki. Dengan menjalankan fungsi-fungsi sosial ini, Female Peacekeepers telah mewujudkan konsep pemberdayaan perempuan dengan keterlibatan wanita TNI dibekali kemampuan khusus sangat cocok untuk mendukung kegiatan CIMIC.

Menurut Kol Kav Didik Setiadi selaku Paban VIII/Opslugri Sops TNI,

bahwa “kuota” Female Peacekeepers dalam OPPD belum terpenuhi, sesuai harapan dalam Resolusi DK PBB 1325 yang mendorong partisipasi seimbang dari wanita militer di setiap bagian misi. PBB mengharapkan setiap TCC dapat memenuhi sekitar 15% sampai 30% dari personel yang dikirimkan ke misi PBB. Saat ini prosentase jumlah Wanita TNI yang dikirim dalam tugas tersebut, jumlahnya masih jauh di bawah harapan (di bawah 4% dari jumlah personel).

Adapun penyebab masih belum terpenuhinya kuota Female Peacekeeper dalam Satgas TNI, disebabkan tidak semua jabatan dalam Satgas TNI bisa dijabat oleh wanita TNI. Data tambahan dari Kolonel Inf Herman Harnaz selaku Dirbin Pers PMPP TNI terkait dengan perbedaan kultur militer Indonesia dengan negara lain. Dalam TNI, Wanita TNI tidak diperuntukan untuk tugas-tugas bersifat tempur.

2. Merancang konsep baku kegiatan CIMIC TNI didukung anggaran, sarana dan prasarana.

Menurut Kolonel Kav Didik Setiadi selaku Paban VIII/Opslugri Sops TNI, bahwa sejak awal misi OPPD, kegiatan CIMIC yang dilakukan oleh Satgas TNI didasari komunikasi yang terjalin antara Satgas TNI dengan masyarakat lokal di tempat penugasan, yang terbukti berhasil. Sebab, personel Satgas TNI dinilai mampu memberi dampak bagi masyarakat lokal maupun pengungsi di daerah misi. Kemampuan prajurit TNI yang unggul dengan “sikap teritorial”-nya, yakni mengedepankan 3S; “Salam-Senyum- Sapa”, mampu memberi kesan positif bagi masyarakat di tempat penugasan. Salah satu fakta pada tahun 2010,

Indonesia diminta mengirimkan personel sebagai FC CIMIC Unit dalam misi UNIFIL. Satgas CIMIC yang merupakan Force Commander asset, berada langsung di bawah komando Force

Commander. Contoh lain, saat Satgas TNI Indobatt melaksanakan kegiatan CIMIC di desa Adshit Al Qusair. Meski dilakukan dengan dana terbatas, namun Satgas TNI dinilai mumpuni dalam kegiatan CIMIC, sehingga akhirnya seluruh desa di wilayah tanggung jawab Satgas Indobatt, justru dibantu proyek dari Negara Spanyol.

Menurut data dari Kolonel Inf Setyo Wibowo selaku Dansatgas TNI merangkap Komandan Kontingen TNI Lebanon, diperkuat dengan Kolonel Inf Daniel Nainggolan Dansatgas RDB TNI di Kongo, menyampaikan bahwa kegiatan CIMIC yang dilakukan lebih banyak berupa komunikasi sosial bersifat non fisik, seperti pelayanan kesehatan. Namun ada juga permintaan dari beberapa desa di seputar base camp Satgas TNI, yang memerlukan bantuan secara fisik. Seiring dengan hasil pengamatan dan evaluasi dari negara masing-masing, mereka semua mendukung kegiatan CIMIC. Antara lain berupa pemberian bantuan nyata secara fisik, yang dapat dirasakan oleh masyarakat lokal di daerah konflik.

Hal ini belum sesuai dengan Teori Optimalisasi. Sebab, melihat kondisi nyata saat ini, dalam meraih simpati masyarakat lokal untuk mendukung keberhasilan tugas, tidak cukup dilaksanakan dengan No/Low Cost Cemic Activity (tanpa bantuan dana). Dengan pertimbangan: masyarakat di tempat penugasan, pasca terjadinya konflik, juga membutuhkan bantuan berupa sarana dan prasarana, infrastruktur, serta fasilitas umum lainnya yang hancur akibat konflik.

Jika saja CIMIC sudah dirancang secara baku dan matang, lengkap dengan rancangan anggaran dan sebagainya, tentunya dapat dijadikan peluang yang baik untuk lebih memantapkan Diplomasi Militer di forum Internasional.

- e. Tugas dan Fungsi PMPP TNI dalam Mendukung Strategi

Kampanye Militer. "Penugasan PBB yang diemban prajurit TNI, merupakan tugas yang istimewa. Karena, sebagai prajurit, juga menjadi duta bangsa, duta TNI, dan menjadi wajah TNI di forum internasional," pesan tertulis Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Kompas.com, 17/12/2020). Tugas yang diemban Kontingen Garuda, memang sarat dengan misi kebangsaan. Sebab, tugas tersebut tak hanya terkait aspek militer, tetapi juga aspek politik, diplomasi maupun budaya. Maka Panglima TNI mengingatkan, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan segenap prajurit TNI akan menjadi cerminan kualitas TNI dan negara Indonesia di hadapan masyarakat internasional dan militer negara lain.

Selama ini, tugas dan Fungsi PMPP TNI secara sudah berjalan dengan baik berdasarkan Perpang TNI Nomor 73 Tahun 2019, dalam mendukung Strategi Kampanye Militer dengan melakukan Diplomasi Militer, terkait penyiapan menyelenggarakan organisasi. Mulai dari perencanaan anggaran, kesiapan operasi, seleksi, pelatihan, rotasi pasukan (pemberangkatan / pengembalian), pembinaan personel, logistik Operasi untuk Satgas TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda, Pengamat Militer (Military Expert on Mission), Staf Militer (Military Staff/Milstaff) dan penugasan lainnya antara lain pada misi UNIFIL, UNMISS di Sudan Selatan, UNISFA di Sudan, UNAMID di Darfur, MONUSCO di Kongo, UNMIL di Liberia, MINUSTAH di Haiti, RDB MONUSCO di Kongo dan UNPRC di Yaman.

Latihan kerja sama dengan militer negara lain yang tergabung dalam pasukan PBB, menurut Mayjen TNI Victor Hasudungan Simatupang, M.Bus selaku Komandan PMPP TNI, meliputi latihan OPPD. Mulai dari Global Peace Operation Initiative (GPOI), Hostile Environment Awareness Training (HEAT), hingga Cobragold (Multilateral di Thailand), Garuda Ayara (Bilateral Indonesia dan Thailand) dan Garuda Kookabura (Bilateral Indonesia dan Australia). Dan menurut Kolonel Kav Didik Setiadi selaku Paban VIII/Opslugri Sops TNI, setiap Triwulan PMPP TNI bersama TKMPP mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas TNI. Termasuk mengenai pelaksanaan Diplomasi militer yang diperankan PMPP TNI sebagai diplomasi pertahanan.

Namun hal ini ternyata belum sesuai dengan Teori Diplomasi Militer, khususnya terkait sasaran strategis, seperti hubungan yang bersifat Bilateral dan Multilateral. Contohnya, penugasan TNI dalam misi OPPD atau misi kemanusiaan belum diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut, sebagai salah satu strategi penangkalan dalam Kampanye Militer. Dalam hal ini, sebagai tindak lanjut upaya pemerintah dalam sistem pertahanan negara yang dilakukan secara dini.

Posisi tawar TNI sangat bergantung pada kapabilitas atau kemampuan TNI itu sendiri. Namun secara nyata, kita dapat melihat bahwa TNI saat ini belum maksimal bila dikaitkan dengan kemampuan personel maupun berstrategi. Kemampuan personel TNI masih kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan, khususnya dalam bidang diplomasi, akibat faktor penguasaan bahasa dan wawasan yang mumpuni. Padahal, Kampanye militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional, pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan,

serta melibatkan komando permanen (Kogab) dan komando non-permanen/bentukan (Kogasgab). Salah satu Strategi Kampanye Militer yang dilaksanakan adalah PMPP TNI menyiapkan Satgas TNI dalam OPPD guna mendukung upaya diplomasi luar negeri.

Kampanye militer juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan strategi Panglima Komando Gabungan (Pangkogab). Rangkaian operasi militer yang dilaksanakan untuk menanggulangi setiap ancaman militer yang diperkirakan—berdasarkan pada rencana kontinjensi yang dirumuskan—melalui perencanaan strategis, untuk menghadapi ancaman yang bersifat mendadak dan menghadapi ancaman di luar perkiraan. Maka, rangkaian operasi militer yang dilaksanakan, berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem politik Nasional. Sebab, strata strategi militer merupakan bagian dari strategi raya/strategi Nasional (grand/ national strategy) yang memuat kepentingan Nasional (cita-cita dan tujuan nasional).

Mengingat hal tersebut, maka penyelenggaraan kampanye militer tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik dalam pengerahan kekuatan TNI dan kekuatan Nasional lainnya, dalam pencapaian tujuan Nasional yang telah ditentukan. Maka, mutlak diperlukan pemahaman utuh tentang kedudukan Kampanye Militer dalam konteks politik Nasional maupun strategi, beserta kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh masing-masing strata, serta pejabat yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye militer (Naskah Kammil, 2013).

Hubungan kampanye militer dengan politik luar negeri, adalah sebagai berikut :

- a. Dalam keadaan perang penyelenggaraan politik luar negeri (diplomasi) bersifat mendukung penyelenggaraan kampanye militer sedangkan

kampanye militer menunjang politik luar negeri.

- b. Kemajuan yang dicapai dalam kampanye militer akan memperkuat upaya diplomasi.
- c. Penyelenggaraan politik luar negeri (diplomasi) merupakan upaya menggalang kekuatan Internasional untuk mendapatkan dukungan politik dalam rangka penyelenggaraan kampanye militer.

SIMPULAN

Dari penguraian permasalahan serta pokok-pokok persoalan yang telah dibahas pada Bab-bab sebelumnya mengenai tugas dan fungsi PMPP TNI, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, penyempurnaan model perekrutan. Untuk mengatasi belum optimalnya kualitas personel OPPD dalam menghadapi tantangan tugas di daerah misi, maka perlu mengoptimalkan pelaksanaan rekrutmen calon personel, penyiapan perwira TNI pada jabatan strategis, penyiapan tenaga Instruktur, sarana dan prasarana serta pengendalian kegiatan Satgas TNI. Untuk itu perlu diimplementasikan berbagai upaya. Baik melalui metode koordinasi, evaluasi, revisi, perencanaan, standarisasi, sosialisasi, pembekalan dan pelatihan, rekrutmen, kerjasama serta pengawasan oleh Menhan, Panglima TNI, Kapusdiklat Bahasa Kemhan, Asops Panglima TNI, Kapuskes TNI, Dandenma Mabes TNI, Kainfolakta TNI dan Para Kas Angkatan. Hal ini guna terseleksi dan terciptanya kesiapan Satgas TNI yang memiliki kualitas tinggi, memiliki keterampilan serta pengetahuan yang mahir dan menguasai, sesuai dengan standar UNPCRS terkait penyiapan pasukan yang akan dikirim dalam OPPD. Untuk mengatasi minimnya keterlibatan PMPP TNI dalam Penyiapan, Pemeliharaan dan

Penggantian materiil atau Contingent Owned Equipment (COE) yang digunakan pada OPPD, adalah dengan cara meningkatkan efektifitas dukungan logistik dan bekal ulang Satgas OPPD. Diperlukan adanya kemampuan PMPP TNI dalam pengadaan barang dan jasa secara mandiri, maka perlu dibentuk suatu badan pengungsi di daerah misi, serta peningkatan kemampuan dan sikap teritorial prajurit TNI. Menyelenggarakan tugas CIMIC TNI yang unggul dan menuai banyak pujian internasional karena menggunakan pola-pola pendekatan humanis dan dikemas secara apik dengan tagline "To Win The Heart and Mind of The People", agar makin memantapkan Citra Indonesia di dunia Internasional, dengan dua cara. Pertama, merancang konsep baku kegiatan CIMIC yang terdukung dari sisi anggaran, sarana dan prasarana dengan metode evaluasi, sosialisasi, validasi, koordinasi, pengawasan, fasilitasi, konsultasi, komunikasi, pembinaan, pengembangan, aplikasi, pengawasan oleh Mabes TNI, Sops TNI, Srenum TNI dan Mabes Angkatan. Mengingat, tantangan tugas OPPD semakin kompleks dan menantang, dari yang semula bersifat inter-state menjadi intra-state. Kedua, menambah jumlah dan menyiapkan female peacekeepers, dengan kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam kegiatan CIMIC TNI. Keberhasilan TNI dalam misi PBB, selain sebagai Strategi Kampanye Militer Indonesia, juga memainkan peran diplomasi militer sekaligus memainkan peran diplomasi publik. Artinya, sebagai penjaga perdamaian dunia atau peacekeeping, pasukan dari tiap negara "mempresentasikan" peran militernya maupun nirmiliter-nya. Di mata dunia, ini adalah ajang bagi Indonesia dalam melakukan soft power diplomacy, dan pada saat yang sama juga memproyeksikan pengembangan kekuatan militernya atau hard power diplomacy. Maka, penting bagi PMPP TNI

untuk mempersiapkan Satgas TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB OPPD sebagai ujung tombak kekuatan militer yang mewakili Negara Indonesia, secara optimal.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu pentingnya penyiapan perwira TNI pada jabatan strategis dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi PMPP TNI, disarankan kepada Panglima TNI agar dapat mendukung kebutuhan tersebut. Baik dari segi kegiatan maupun anggaran, perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepelatihan di PMPP TNI, serta mulai dari melakukan lobi-lobi bargaining positioning perwira TNI untuk jabatan strategis. Hal ini bertujuan untuk menjamin terpeliharanya profesionalisme dalam mendukung tahap lanjutan dari proses penyiapan Satgas TNI, khususnya melalui kegiatan Pre-Deployment Training (PDT), agar terwujud personel Satgas TNI yang tangguh dan dapat diandalkan di daerah misi. Guna mendukung penyiapan, Pemeliharaan dan Penggantian materiil atau Contingent Owned Equipment (COE) yang digunakan pada OPPD, maka perlu adanya kemampuan PMPP TNI dalam pengadaan barang dan jasa secara mandiri, baik di dalam maupun di luar negeri. Disarankan kepada Pemerintah dan Panglima TNI agar dapatnya mengevaluasi dan menerbitkan peraturan pengadaan barang dan jasa khusus bagi Satgas TNI, memberikan kewenangan kepada PMPP TNI untuk membentuk badan pengadaan barang dan jasa secara mandiri—baik di dalam maupun di luar negeri, demi mengatasi birokrasi yang panjang dan rumit—Serta menyusun anggaran reimbursement PBB secara tepat guna dalam pemenuhan materiil secara efisien sesuai dengan UNPCRS, agar kesiapan operasional Satgas TNI di daerah misi di seluruh dunia dapat terjamin, tanpa melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan

penyiapan tugas CIMIC TNI dalam OPPD yang berhasil dan berkesinambungan, maka disarankan kepada Pemerintah dan Panglima TNI untuk: membuat aturan kebijakan terkait rekrutmen bagi para female peacekeepers, membuat piranti lunak dengan mengadopsi dengan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan CIMIC, serta mengalokasikan anggaran sehingga Satgas TNI dapat melaksanakan kegiatan CIMIC secara berkesinambungan dengan memberikan bantuan nyata secara fisik seperti perbaikan sarana dan prasarana di daerah misi OPPD yang dapat memantapkan nama Indonesia di forum Internasional. Demi mendukung Strategi Kampanye Militer, maka disarankan kepada Kementerian terkait dan Panglima TNI untuk membuat aturan kebijakan sehubungan aktivitas diplomasi-diplomasi dan kerjasama militer, khususnya yang terkait dengan OPPD. Serta perlunya menempatkan Pamen dan Pati TNI dalam jabatan Strategis di daerah misi maupun di markas UN secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, sebagai sarana untuk memantapkan diplomasi militer di forum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Petunjuk Pelaksanaan Nomor 906/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Operasi Pemeliharaan perdamaian Dunia.
- Data jumlah personel dan negara kontribusi pada Misi UNIFIL PBB posisi April 2020 pada <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>, diakses pada 27 Mei 2020.
- Departement of Peacekeeping Operation, PCRS (Peace Capability Readiness System) for member state date 6 July 2018
- Dr. I Wayan Midhio, M. Phil, 2020 tentang Manajemen Logistik Pertahanan.
- Dr. M. Adnan Madjid, SH, M.Hum (2017), Hasil Penelitian Pre Deployment Training di Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP TNI) dalam Mendukung Tugas Pasukan Perdamaian Indonesia.
- Kemhan RI. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kemlu RI, Keanggotaan Indonesia dalam DK PBB pada https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb diakses pada tanggal 27 Mei 2020.
- Kemlu, Booklet Indonesia Candidate for Human Rights Council 2020-2022.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.
- Literasi Publik (2018), Paparan singkat TNI.
- Logistik Militer pada <https://id.wikipedia.org/logistik-militer> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.
- PBB, UNPCRS (United Nations Peace Capability Readiness System) pada <https://peacekeeping.un.org/en/military> diakses pada tanggal 27 Mei 2020.
- Penyiapan Satgas TNI dalam Misi Perdamaian sebagai Implementasi Undang-Undang No. 34 tentang TNI Tahun 2004 oleh Mayjen TNI Ir. Arief Rachman, M.A., M.BA, Komandan Seskoad pada Kajian Seskoad TW III Tahun 2013.
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/14/III/2008 tanggal 27 Maret 2009 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk Operasi Militer Selain Perang.
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/4/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengesahan Validasi Orgas PMPP TNI.
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/60/2017 tentang Penugasan Prajurit TNI pada Operasi pemeliharaan Perdamaian.
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/73/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Validasi Orgas PMPP TNI.
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/73/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Validasi Orgas PMPP TNI.

Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Piagam PBB, 26 Oktober 1945 tentang Aturan PBB.

Presidensi Indonesia pada DK PBB tanggal 1 Juni 2019 di Newyork, yang salah satunya tentang mempromosikan PMPP TNI sebagai Triangular Partnerships Projects pada 2020 -2021 untuk memberikan pelatihan yang berkualitas bagi pasukan penjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Putranto, AM (2015), Peningkatan kemampuan TNI dalam Pemeliharaan Perdamaian Dunia Guna Memantapkan Diplomasi dalam Rangka Mendukung Tercapainya Tujuan Nasional.

Rachmat, Angga Nurdin, Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda UNIFIL TNI di Lebanon Selatan (Bandung: Jurnal Ilmiah Universita Jenderal Achmad Yani, 2015).

Sir Earnest Satow (1995) Guide to Diplomatic Practice [https:// id.wikipedia. org /wiki/Ernest_Satow](https://id.wikipedia.org/wiki/Ernest_Satow).

Strategi Militer pada <https://r4kh424.blogspot.com/2016/12/strategi-militer> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

Syarifudin Harahap (2013) [https: // jabarprov.go.id/ index.php/ news/ 7266/ Simposium_III_Rencana_Kampanye_Militer](https://jabarprov.go.id/index.php/news/7266/Simposium_III_Rencana_Kampanye_Militer).

Triyoga Budi Prasetyo (2014), Diplomasi pertahanan sebagai bagian dari Diplomasi total RI.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang- undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang- undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Yandi Santoso, 2019 Kontribusi Bangsa Indonesia dalam Perdamaian Dunia.

Zulvyanie Pilgrimmy Firohmatillah Arfin Sudirman, 2019 Peran Korps Wanita TNI sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dalam Humanitarian Assistance di Lebanon.